

SKRIPSI

**KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SANGGAU**

Oleh:

Endah Handayani
E1031201028

**Program Studi Ilmu Pemerintahan
Kajian Ilmu Administrasi**



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2025

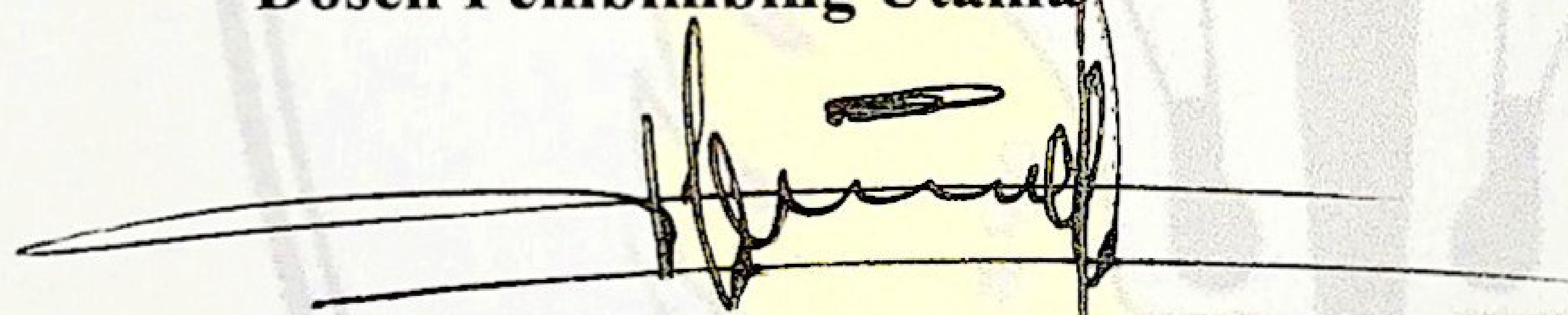
LEMBAR PENGESAHAN

**KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SANGGAU**

Tanggung Jawab Yuridis Pada :

Endah Handayani
E1031201028

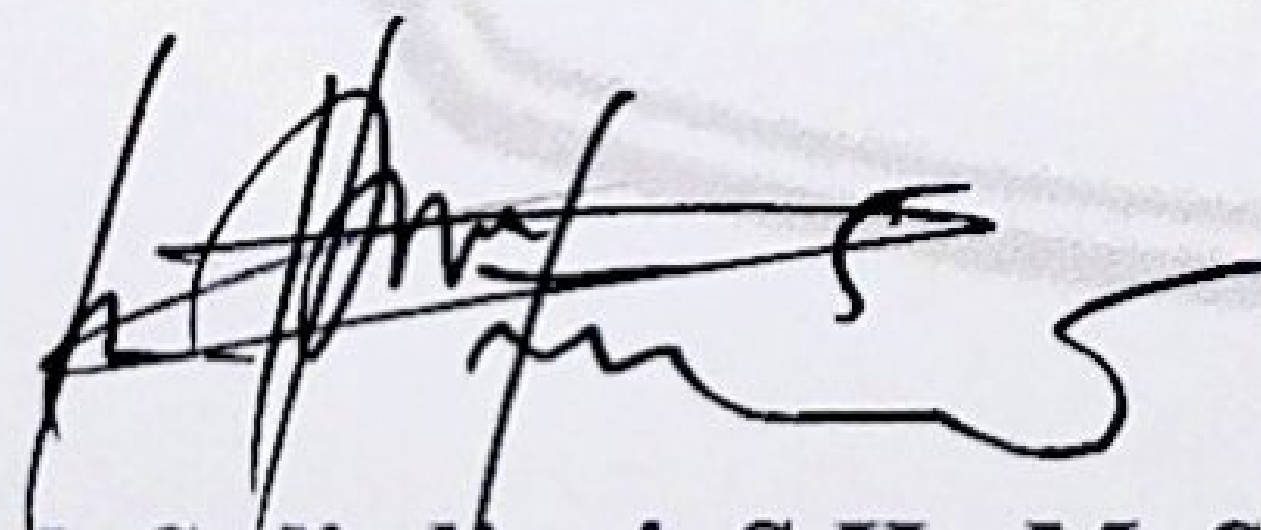
Dosen Pembimbing Utama



Dr. Yulius Yohanes, M. Si
NIP. 19640527199202100

Tanggal : 26 Mei 2025

Dosen Pembimbing Pendamping



Indah Sulisdiani, S.H., M. Si
NIP. 196512122007102001

Tanggal : 26 - Mei - 2025

HALAMAN PENGESAHAN
KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SANGGAU

Oleh:

Endah Handayani

NIM. E1031201028

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Maret 2025
Waktu : 09:00 – 11:30 WIB
Tempat : Ruang Seminar Fisip UNTAN/

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Yulius Yohanes, M.Si
NIP. 19640527199202100

Endah Sulisdiani, S. H., M. Si
NIP. 196512122007102001

Penguji Utama

Penguji Pendamping

Dr. Ir. Ida Rochmawati, M. Si
NIP. 196905021998022001

Drs. Sugino, M. Si
NIP. 196609041995121001

Disahkan Oleh :
Dekan Fisip Untan



Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Endah Handayani (E1031201028) : Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Tanjungpura, Pontianak. 2025.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis terkait Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau. Fokus penelitian ini dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini menggunakan teori Kinerja menurut Dwiyanto (2006:50-51) dalam (Pasolong, 2019:206-208), untuk mengukur kinerja dapat menggunakan indikator sebagai berikut : Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun Permasalahan yang ditemukan, koordinasi antarinstansi yang lemah, keterbatasan anggaran, minimnya tenaga pendamping, serta kurangnya kesadaran orang tua dan masyarakat. Hasil penelitian ini meliputi : Produktivitas DINSOSP3AKB Sanggau dipengaruhi fasilitas mobilitas, dukungan anggaran, serta layanan terpadu. Kendala utama mencakup koordinasi antarinstansi, minimnya tenaga pendamping, dan lemahnya pengawasan orang tua. Kualitas Layanan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan rehabilitasi. Tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya serta lemahnya pengawasan terhadap anak di sekolah dan tempat umum. Responsivitas, espons cepat ditunjukkan melalui SOP, layanan pengaduan, dan koordinasi dengan kepolisian. Tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya dan akses wilayah terpencil. Responsibilitas, Pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban dilakukan melalui sosialisasi, pendampingan hukum, serta rehabilitasi. Pengawasan melalui laporan berkala memastikan prosedur berjalan sesuai hukum dan Akuntabilitas, Sistem pengawasan mencakup laporan berkala dan transparansi dalam pencatatan tindakan. Kendala utama adalah respons cepat di wilayah terpencil yang membutuhkan biaya operasional tambahan.

Kata Kunci : Kinerja, DINSOSP3AKB, Kekerasan Terhadap Anak

ABSTRACT

Endah Handayani (E1031201028): Performance of the Social Service, Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning of Sanggau Regency. **Thesis. Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak. 2025.**

This research aims to identify and analyse the performance of the Social Service, Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning of Sanggau Regency. The focus of this research is in handling cases of violence against children. This study uses the theory of performance according to Dwiyanto (2006: 50-51) in (Pasolong, 2019: 206-208), to measure performance can use the following indicators: Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibilities, and Accountability. The method used is a qualitative approach, the techniques used are interviews, observation and documentation. The problems found were weak coordination between agencies, limited budget, lack of assistants, and lack of awareness of parents and the community. The results of this study include: DINSOSP3AKB Sanggau's productivity is influenced by mobility facilities, budget support, and integrated services. The main obstacles include inter-agency coordination, lack of facilitators, and weak parental supervision. Service quality, psychological assistance, legal aid, and rehabilitation. The main challenges include limited resources and weak supervision of children in schools and public places. Responsiveness, rapid response demonstrated through SOPs, complaint services, and coordination with the police. The main challenges are limited resources and access to remote areas. Responsiveness, Prevention, handling and recovery of victims are carried out through socialisation, legal assistance and rehabilitation. Supervision through periodic reports ensures procedures are in accordance with the law and Accountability, The supervision system includes periodic reports and transparency in recording actions. The main obstacle is rapid response in remote areas which requires additional operational costs.

Keyword : Performance, DINSOSP3AKB, Violence Against Children



RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau”. Judul ini dipilih karena terdapat permasalahan tantangan dalam memberikan pelayanan publik yang belum optimal salah satunya yaitu di bidang perlindungan terhadap hak-hak anak, yang dimana khususnya Kabupaten Sanggau sendiri angka kasus kekerasan terhadap anak meningkat secara signifikan sejak tahun 2020 hingga 2024.

Terdapat permasalahan Kinerja DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak masih menghadapi berbagai kendala, seperti koordinasi antarinstansi yang belum optimal, keterbatasan anggaran, serta permintaan pendampingan mendadak yang menghambat efektivitas layanan. Kurangnya pengawasan orang tua, penggunaan media sosial yang masif, tingginya kasus bullying di sekolah, lemahnya kontrol terhadap anak di kafe dan kost, serta minimnya Lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) turut berkontribusi pada peningkatan signifikan kasus kekerasan terhadap anak. Selain itu, minimnya tenaga pendamping dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak memperburuk situasi.

Berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan pada masalah - masalah tersebut peneliti menggunakan teori kinerja menurut Dwiyanto (2006:50) dalam (Pasolong, 2019:206-208), dengan indikator Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu peneliti menganalisis data dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan melakukan penarikan kesimpulan. Untuk memeriksa keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini yang dilaksanakan, berdasarkan teori Kinerja menurut (Dwiyanto, 2006:50) dalam (Pasolong, 2019:206-208), bahwa indikator Produktivitas, Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dipengaruhi fasilitas mobilitas, dukungan anggaran, serta layanan terpadu seperti P2TP2A. Kendala utama mencakup koordinasi antarinstansi, keterbatasan anggaran, pendampingan mendadak, kurangnya tenaga pendamping, serta lemahnya pengawasan orang tua. Kasus meningkat akibat media sosial, bullying, dan minimnya PATBM. Kualitas Layanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau berperan dalam menangani kasus kekerasan anak melalui pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan rehabilitasi. Layanan ini didukung SOP ketat serta koordinasi antarinstansi. Tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya dan lemahnya pengawasan terhadap anak di lingkungan sosial seperti sekolah dan tempat umum. Responsivitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau menunjukkan responsivitas tinggi dalam menangani kasus kekerasan anak melalui SOP terstruktur, layanan pengaduan, dan koordinasi dengan

kepolisian serta lembaga masyarakat. Masyarakat dilibatkan melalui PATBM, meski baru ada di 6 desa dari 163. Tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya dan akses wilayah, diatasi dengan kerja sama pemerintah desa dan kecamatan untuk pendampingan optimal.

Responsibilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak mencakup pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban melalui sosialisasi, pendampingan hukum, serta rehabilitasi. Keberadaan SK dan SOP menjadi panduan dalam memastikan pegawai menjalankan tugasnya secara efisien meskipun belum ada pedoman khusus. Akuntabilitas kinerja DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak dijaga melalui sistem pengawasan dan evaluasi yang terstruktur, termasuk rekapitulasi laporan setiap enam bulan dan penyediaan data pendampingan secara fleksibel. Tantangan utama adalah kebutuhan respons cepat terhadap kasus di lokasi terpencil yang memerlukan biaya operasional tambahan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan permasalahan yang ditemukan di lapangan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan serta mendukung upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Dinas Sosial perlu memperkuat koordinasi antarinstansi dalam alokasi sumber daya dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkala serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap anak.

Pengawasan terhadap penyuluhan dan edukasi di masyarakat harus diperkuat, dengan memperluas jangkauan layanan ke wilayah terpencil serta meningkatkan pemantauan media sosial guna mendeteksi potensi kekerasan. Akses pelaporan harus diperluas melalui *platform digital*, sementara koordinasi dengan Unit PPA Polres Sanggau dan pemerintah desa ditingkatkan untuk mempercepat penanganan kasus. Pengawasan internal perlu diperkuat dengan pembaruan SOP dan evaluasi berkala terhadap kinerja petugas. Layanan dapat ditingkatkan melalui laporan transparan, pengawasan ketat, serta pemanfaatan teknologi dalam pelaporan dan pengelolaan anggaran guna memastikan efektivitas perlindungan anak.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Endah Handayani

Nomor Mahasiswa : E1031201028

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis adalah hasil karya asli saya sendiri, bukan hasil karya orang lain dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di program studi, fakultas, atau perguruan tinggi lain. Selama pengetahuan saya, skripsi ini tidak memuat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara jelas dirujuk dalam Daftar Pustaka di skripsi ini.

Pontianak, 30 Januari 2025

Saya membuat pernyataan



1000
SEPULUH RIBU RUPIAH
TEL 20
METERAI
TEMPEL
4DF91AMX368533945

Endah Handayani
E1031201028

MOTTO

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(QS Al-Insyirah: 5-6)

*“Lakukan apa yang kau mau sekarang,
Saat hatimu bergerak jangan kau larang,
Hidup ini tak ada artinya, maka
Kau bebas mengarang maknanya seorang!”*

(Hindia-Berdansalah, Karir Tak Ada Artinya)

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI DIPERSEMBAH KEPADA :

1. Teruntuk ayahanda tercinta Bapak Suharto, terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan peneliti, beliau memang tidak merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau berhasil mendidik peneliti dan saudara-saudara peneliti menyelesaikan studinya hingga sarjana. Semoga hal-hal baik akan selalu beriringan menyertai Bapak hingga akhir hayat.
2. Ibunda tercinta sekaligus pintu surgaku, Mama Titik Sulastri, S. Pd yang telah melahirkan saya. Terima kasih telah menjadi Ibu guru terbaik sepanjang hidup peneliti hingga peneliti bisa berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai bentuk perwujudan serta bakti anak terhadap orangtua. Skripsi ini untuk Ibu guru terbaik sepanjang hidup saya.
3. Kakak dan Adik terkasih, Dyah Utami, A. Md. Kep dan Agung Nugroho, A. Md. TM terima kasih telah memberikan semangat, dukungan, dan motivasi kepada peneliti. Semoga selalu diberkahi rejeki melimpah serta umur panjang agar dapat terus kebersamai keberhasilan-keberhasilan satu sama lain.
4. Sahabat selama menempuh Sekolah Menengah Atas, Dayang Urmila Shahnaz Vedy, S. KH dan Meiranda Vinia Atilla Putri, S. Tr. Ars. Terima kasih atas segala bentuk dukungan yang tidak pernah padam. Semoga

Perjalanan kita akan terus dipenuhi oleh keberhasilan serta beriringan selalu dengan kebahagiaan.

5. Keponakan tercinta yang selalu menemani peneliti ketika sedang dalam kondisi tidak percaya diri, Shakilla Zianka, Azzura Khaira, Emir Hafiz Mauza, Aziva Gayatri Banurasmi Putri Aditya, dan Abyan Arkhana Aysan. Terima kasih sudah menemani susah senang aunty selama menulis skripsi ini. Semoga segala keberkahan dan umur panjang akan selalu menyertai semuanya.
6. Sahabat Lambe Turah, Siska Dianita, Raihannisa Rachmida, Winda Wulandari, Dinda Priya Kamila, Yulia Sartika, dan Ayu Shapira. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan di tanah perantauan ini, dukungan, semangat, motivasi, serta kebersamaan yang kita ciptakan selama masa kuliah akan menjadi bagian yang tidak akan terlupakan selama menjadi mahasiswa. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan satu sama lain tidak akan pernah usai meskipun segala sesuatu yang dimulai akan selesai.
7. Sahabat terbaik peneliti, Yupita. Terima kasih atas segala bentuk dukungan serta semangat sampai skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan walau dalam waktu yang cukup lambat. Semoga apa yang kita usahakan ini dapat menjadi sebuah penghargaan untuk diri kita masing-masing karena telah berusaha keras menyelesaikan apa yang telah kita mulai.

8. Terakhir kepada diri saya sendiri, Endah Handayani. Terima kasih atas usaha yang dikorbankan hingga sampai pada titik ini. Terima kasih tetap memilih untuk merayakan dirimu sendiri, walau sering kali merasa putus asa, namun terima kasih tetap menjadi manusia waras yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan semaksimal mungkin. Ini merupakan bentuk dari kerja keras dan ketekunan. Berbahagialah dimanapun berada, Endah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau” guna memenuhi syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

Peneliti menyadari jika penyusunan Skripsi ini memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Namun, kelancaran dalam menyelesaikan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti. Tidak lupa pula peneliti ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen pembimbing utama Bapak Dr. Yulius Yohanes, M. Si dan Dosen pembimbing pendamping Ibu Indah Sulisdiani, S. H, M. Si. Berangkat dari pengerjaan Skripsi ini dapat menjadi langkah awal bagi peneliti dalam menuntun perjalanan hidup yang panjang sehingga dapat menjadi buah dari ilmu pengetahuan yang sudah peneliti dapatkan hingga saat ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan memberikan apresiasi sebanyak-banyaknya kepada :

1. Dr. Herlan, S. Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

2. Bima Sujendra, S.IP, M.Si selaku Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Dr. S. Y. Pudjianto, M. Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Dosen, Staf Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan dukungan selama perkuliahan dan kemudahan dalam mengurus persyaratan-persyaratan dalam penulisan Skripsi ini.
5. Dr. Ir. Hj. Ida Rochmawati, M. Si selaku penguji utama dan Drs. Sugino, M. Si selaku penguji pendamping yang telah memberikan saran dan masukan agar penulisan Skripsi ini memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
6. Seluruh ASN dan staf Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau yang telah memberikan Ilmu dan pengalamannya dalam skripsi ini.

Akhir kata peneliti berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Peneliti mengharapkan saran dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga Skripsi ini dapat dikembangkan lebih lanjut kedepannya.

Pontianak, 30 Januari 2025

Peneliti,

Endah Handayani
E1031201028

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
ABSTRAK	i
<i>ABSTRACT</i>	ii
RINGKASAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian	11
1.3 Fokus Penelitian	11
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian.....	12
1.6 Manfaat Penelitian.....	13
1.6.1 Manfaat Teoritis	13
1.6.2 Manfaat Praktis.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Definisi Konsep.....	15
2.1.1 Kinerja	15
2.1.2 Dinas Sosial	17
2.1.3 Pemberdayaan Perempuan.....	18
2.1.4 Perlindungan Anak	20
2.1.5 Keluarga Berencana (KB)	22
2.2 Teori	24
2.2.1 Kinerja	24
2.2.2 Indikator Kinerja.....	26
2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja.....	29
2.3 Hasil Penelitian yang Relevan.....	31
2.4 Alur Pikir Penelitian	35
2.5 Pertanyaan Penelitian	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Langkah-Langkah Penelitian.....	41
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
3.3.1 Lokasi Penelitian	42

3.3.2 Waktu Penelitian	43
3.4 Subjek dan Objek Penelitian	43
3.4.1 Subjek Penelitian	43
3.4.2 Objek Penelitian	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data	45
3.6 Instrumen Pengumpulan Data	46
3.7 Analisis Data	47
3.7.1 Teknis Analisi Data	47
3.7.2 Teknik Keabsahan Data.....	49
BAB IV GAMBARAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SANGGAU	51
4.1 Gambaran Umum Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.....	51
4.1.1 Visi Misi dan Motto Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.....	51
4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.....	54
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	57
4.1.4 Keadaan Kepegawaian	65
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
5.1 Deskripsi Hasil Penelitian	68
5.2 Analisis.....	71
5.2.1 Produktivitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau	72
5.2.2 Kualitas Layanan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau	84
5.2.3 Responsivitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau	96
5.2.4 Responsibilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau	104
5.2.5 Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau	110
BAB VI PENUTUP	118
6.1 Kesimpulan.....	118
6.2 Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	128

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Laporan Pengaduan Kasus Anak DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau...	7
4.1 Jumlah Pegawai Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023.....	66
4.2 Jumlah Pegawai Kontrak Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023.....	67
5.1 Data Pendamping Kasus Anak Dinsosp3AKB Kabupaten Sanggau.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Grafik Laporan Pengaduan Kasus Anak DINSOSP3AKB Sanggau.....	8
2.1 Alur Pikir Penelitian.....	38
4.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.....	56
5.1 Sosialisasi Dinsosp3AKB Kabupaten Sanggau.....	74
5.2 Standar Operasional Prosedur Dinsosp3AKB Kabupaten Sanggau.....	86
5.3 Informasi Pengaduan Tindakan Kekerasan Dinsosp3AKB Kabupaten Sanggau.....	89
5.4 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau.....	91
5.5 Standar Pelayanan Dinsosp3AKB Kabupaten Sanggau.....	99
5.6 Jenis Standar Pelayanan Dinsosp3AKB Kabupaten Sanggau.....	100

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Pedoman Wawancara	129
2 Pedoman Observasi	137
3 Identitas Informan Penelitian	138
4 Dokumentasi Penelitian	139
5 Surat Tugas Penelitian	141
6 Daftar Riwayat Hidup	142

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Menurut Pasolong (2019:203). Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Pada era reformasi dan otonomi daerah saat ini, kinerja pemerintah mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Dengan kebebasan berpendapat, banyak kritik yang ditujukan kepada semua tingkat pemerintahan, mulai dari pusat hingga desa dan kelurahan. Kinerja sendiri adalah upaya pegawai untuk memajukan sebuah lembaga atau organisasi. Daerah memiliki kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, sehingga pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan rakyat dengan lebih terjangkau, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kinerja aparatur pemerintah dalam pelayanan publik adalah aspek penting bagi efektivitas dan efisiensi administrasi publik. Pelayanan yang baik mencerminkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana, peran pemerintah daerah saat ini sangatlah penting.

Berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, melindungi kelompok rentan, serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan anak. Dinas ini memiliki tugas merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan serta program sosial yang fokus pada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana. Fungsi utamanya mencakup pelayanan sosial untuk masyarakat kurang mampu, pengembangan ekonomi perempuan, serta penyediaan layanan perlindungan dan dukungan bagi anak-anak dan keluarga yang membutuhkan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Sanggau melalui program-program yang terstruktur.

Standar Pengukuran Kinerja DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau Berdasarkan TUPOKSI Pengukuran kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) Kabupaten Sanggau dalam menangani kekerasan terhadap anak mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati

Sanggau Nomor 79 Tahun 2021. Standar kinerja dinilai berdasarkan keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi berikut:

1. Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan
Dinas bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan anak, termasuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus. Keberhasilan diukur dari seberapa tepat kebijakan diterapkan dan dampaknya terhadap penurunan kekerasan anak.
2. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan
Kinerja dinilai melalui pelaksanaan evaluasi dan pelaporan rutin terhadap kasus kekerasan anak, termasuk penanganan, dampaknya, dan efektivitas program.
3. Administrasi Layanan
Pengelolaan administrasi bidang perlindungan anak menjadi indikator efisiensi layanan, seperti sistem pengaduan, pendampingan hukum, dan shelter anak.
4. Koordinasi dan Supervisi Antarunit
Koordinasi antara bidang Perlindungan Anak, Rehabilitasi Sosial, serta unit-unit teknis menjadi standar penting dalam mengukur sinergi internal dan eksternal dalam penyelesaian kasus.
5. Fungsi Lain dari Kepala Dinas
Termasuk pelaporan kinerja kepada Bupati secara berkala, pengawasan pelaksanaan tugas unit di bawahnya, serta penyampaian kebijakan berbasis data evaluasi lapangan.
6. Penerapan Tata Kelola dan Pengendalian Internal
Kinerja dinilai melalui efektivitas pelaksanaan sistem kerja terpadu, seperti melalui P2TP2A, dan penerapan prinsip koordinasi, integrasi, serta akuntabilitas publik sesuai Pasal 24–28.

Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau terdiri dari beberapa bidang, seperti pelayanan sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana. Setiap bidang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, Bidang Perlindungan Anak berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Bidang ini memiliki tanggung jawab dalam penanganan kasus kekerasan

terhadap anak, memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan anak, serta memberikan pendampingan kepada korban kekerasan anak, baik dalam proses hukum maupun pemulihan psikologis. Selain itu, Bidang Perlindungan Anak juga menyediakan layanan pengaduan dan respons cepat terhadap kasus kekerasan, serta berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif. Dengan mengacu pada SOP yang berlaku, Bidang Perlindungan Anak memastikan bahwa setiap layanan diberikan secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Berbicara tentang anak, saat ini kekerasan terhadap anak masih menjadi salah satu permasalahan utama yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Sanggau provinsi Kalimantan Barat. Kekerasan anak adalah segala bentuk tindakan fisik, mental, seksual termasuk penelantaran atau perlakuan yang mengancam tubuh maupun perlakuan merendahkan hak-hak anak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap tumbuh kembang mereka yang memiliki otoritas terhadap perlindungan anak. Oleh karena itu, kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana ini menjadi sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan layanan sesuai dengan SOP Layanan Publik Nomor 36 tentang kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/Kota.

Setiap tahun, angka kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat secara signifikan, sehingga negara ini telah masuk dalam kategori darurat kekerasan terhadap anak. Kondisi ini memerlukan perhatian serius, karena perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran penting

orang tua dan seluruh lapisan masyarakat. Mengingat anggaran dan sumber daya manusia di instansi terkait sering kali terbatas, keterlibatan aktif masyarakat dan orang tua menjadi semakin penting. Diharapkan dengan meningkatnya kesadaran dan kepedulian dari berbagai pihak dalam memberikan perlindungan, anak-anak dapat lebih optimal menikmati hak-hak dasar mereka dan terhindar dari berbagai bentuk kekerasan (Hastin, 2021).

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari definisi tersebut telah jelas bahwa anak merupakan seseorang yang jika dilihat dari usianya maka anak sangat memerlukan bimbingan dan perlindungan dari orang tua terutama dalam proses pemenuhan kebutuhannya. Pemerintah Kabupaten Sanggau juga telah menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Menurut Katjasungkana & Danamik (2004:81), Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk menyakiti, merugikan, atau mengancam orang lain, baik secara fisik, psikologis, maupun emosional. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemukulan, pelecehan, penelantaran, atau intimidasi, dan sering menimbulkan dampak jangka panjang bagi korbannya.

Menurut Soeroso (2013:2) kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi. Tindak kekerasan yang dilakukan bukan hanya fisiknya saja namun dari segi psikisnya juga mengalami kekerasan yang dapat merasakannya langsung ialah korban, karena

tindakan kekerasan tersebut dapat langsung berkaitan dengan menyinggung hati nurani dan perasaan anak.

Sebagai wilayah dengan kondisi sosial ekonomi yang beragam, kasus anak di Kabupaten Sanggau meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena kekerasan ini menjadi perhatian serius masyarakat dan lembaga pemerintahan. Penanganan kasus dilakukan melalui empat tahap: pertama, pelaporan dari korban atau pihak terkait; kedua, pencatatan identitas; ketiga, asesmen dan pemberian layanan hukum atau psikologis; keempat, penghentian layanan terhadap korban (Alfarisi, 2020).

Sejak tahun 2020, berbagai kasus yang melibatkan anak-anak, seperti kekerasan fisik dan seksual, penelantaran anak, tindak pidana perdagangan orang, serta terjaring razia pekat, mulai tercatat di Kabupaten Sanggau. Faktor sosial, ekonomi, dan budaya turut memperburuk kondisi anak-anak di wilayah ini. Lemahnya pengawasan orang tua, ditambah dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak, menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak. Data dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau menunjukkan adanya peningkatan signifikan kasus kekerasan terhadap anak di setiap kecamatan sejak 2020 hingga 2024. Fenomena ini mencerminkan masalah yang semakin mengkhawatirkan, baik dari segi jumlah kasus maupun dampak jangka panjang yang ditimbulkan terhadap perkembangan fisik dan mental anak. Dampak buruk ini dapat mempengaruhi masa depan anak dan berpotensi merusak tatanan sosial dalam masyarakat.

Tabel .1.1.
Laporan Pengaduan Kasus Anak DINSOSP3AKB Kabupaten
Sanggau Tahun 2020 – 2024

No	Kecamatan	Tahun					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Kapuas	15	10	14	13	17	69
2	Sekayam	3	4	1	5	2	15
3	Tayan Hilir	2	1	1	2	1	7
4	Tayan Hulu	6	1	1	4	3	15
5	Meliau	4	0	1	5	2	12
6	Kembayan	2	2	1	1	1	7
7	Entikong	2	1	3	0	1	7
8	Parindu	2	1	1	2	2	8
9	Mukok	7	1	0	1	1	10
10	Bonti	2	0	0	2	4	8
11	Balai	0	1	1	3	2	7
12	Beduai	1	1	1	2	2	7
13	Jangkang	0	0	0	1	2	3
14	Toba	0	0	1	2	4	7
15	Noyan	0	1	0	0	2	3
Grand Total		46	10	26	41	46	185

Sumber : Dinsosp3AKB Kabupaten Sanggau 2024

Berdasarkan tabel 1.1. diatas, data laporan pengaduan kasus anak yang diterima oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) Kabupaten Sanggau dari tahun 2020 hingga 2024. Terlihat bahwa jumlah kasus mengalami fluktuasi, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan 2024, masing-masing sebanyak 41 dan 46 kasus. Kecamatan Kapuas menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi selama lima tahun terakhir, yaitu 69 kasus, diikuti oleh Sekayam dan Tayan Hulu masing-masing dengan 15 kasus. Data ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan serius di berbagai kecamatan di Kabupaten Sanggau.

Gambar 1.1. Grafik Laporan Pengaduan Kasus Anak DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau Tahun 2020 – 2024



Sumber : Dinsosp3AKB Kabupaten Sanggau 2024

Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sanggau sejak 2020 hingga 2024 disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah pengaruh media sosial yang membuat anak terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia mereka, memperburuk kondisi psikologis mereka. Selain itu, bullying di lingkungan sekolah dan minimnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak, baik di rumah maupun di luar rumah, semakin memperbesar risiko kekerasan. Keterbatasan Lembaga Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan tenaga pendamping juga memperburuk penanganan kasus kekerasan. Meskipun upaya seperti pelatihan dan pendekatan hukum telah dilakukan, kurangnya kesadaran masyarakat dan dukungan anggaran membuat efektivitas perlindungan anak masih terbatas.

Minimnya tenaga pendamping di Kabupaten Sanggau menjadi salah satu kendala utama dalam menurunkan angka kekerasan terhadap anak. Tenaga

pendamping berperan penting dalam memberikan pendampingan psikologis, hukum, dan sosial kepada korban kekerasan anak. Dengan jumlah tenaga pendamping yang terbatas, upaya penanganan dan pemulihan korban menjadi tidak maksimal. Selain itu, keterbatasan ini menghambat efektivitas dalam melakukan pencegahan melalui pendekatan yang lebih proaktif, seperti pengawasan lebih intensif terhadap anak di lingkungan sekolah, rumah, dan tempat umum. Akibatnya, upaya untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap anak menjadi kurang optimal, sehingga diperlukan penambahan jumlah tenaga pendamping agar layanan yang diberikan lebih efektif dan dapat menjangkau seluruh wilayah dengan baik. Peningkatan jumlah tenaga pendamping juga dapat memperkuat koordinasi antar instansi terkait dan meningkatkan responsivitas terhadap laporan kasus kekerasan anak, terutama di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau.

Kurangnya kesadaran orang tua dan masyarakat tentang hak-hak anak merupakan salah satu faktor yang signifikan dalam meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sanggau. Banyak orang tua yang belum sepenuhnya memahami pentingnya perlindungan hak-hak anak, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk tumbuh kembang yang sehat dan aman. Ketidaktahuan ini seringkali menyebabkan anak-anak tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, baik di rumah maupun di lingkungan sosial. Kurangnya pemahaman ini juga berdampak pada sikap dan perilaku orang tua yang kurang responsif terhadap tanda-tanda kekerasan atau potensi bahaya yang dialami anak. Misalnya, dalam beberapa kasus, orang tua mungkin tidak menyadari pentingnya pengawasan terhadap anak-anak mereka, baik di sekolah, di tempat

umum, maupun saat menggunakan media sosial. Selain itu, stigma sosial yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga atau pada anak sebagai hal yang bisa ditoleransi atau dianggap masalah pribadi seringkali memperburuk situasi.

DINSOSP3AKB Kabupaten Sanggau terus meningkatkan penanganan kasus kekerasan terhadap anak melalui berbagai strategi, seperti pelatihan SDM, penguatan sistem layanan terpadu (P2TP2A), serta kolaborasi antarinstansi seperti kepolisian, psikolog, dan tenaga medis. Penanganan dilakukan secara menyeluruh melalui pendampingan hukum, pemeriksaan VER, konseling, hingga penyediaan shelter bagi korban. Meskipun penanganan terus ditingkatkan, tantangan seperti lemahnya koordinasi antarinstansi dan keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan. Salah satu kebijakan DINSOSP3AKB untuk mengurangi risiko kekerasan anak adalah melalui program pembentukan Forum Anak Daerah hingga pelosok desa, Kota Layak Anak (KLA), dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Anak-anak sering menjadi korban kekerasan psikis dari orang tua, yang menyebabkan luka mental dan menghambat perkembangan mereka di masa depan.

Kerjasama antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak. Selain itu, penguatan kinerja lembaga perlindungan anak dan edukasi bagi masyarakat menjadi langkah mendesak untuk mencegah serta mengurangi kekerasan terhadap anak di masa depan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul “Kinerja Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Identifikasi masalah penelitian adalah proses mengenali dan merumuskan persoalan utama yang akan diteliti, berdasarkan fenomena atau kesenjangan yang terjadi dalam suatu konteks atau bidang kajian tertentu (Sugiyono, 2016:54). Berdasarkan pengamatan sementara terkait Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan yang terjadi yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak sejak tahun 2020 hingga 2024 secara signifikan.
2. Minimnya tenaga pendamping yang tersedia menyebabkan upaya penurunan angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sanggau belum efektif.
3. Kurangnya kesadaran orang tua dan masyarakat tentang hak-hak anak.

1.3 Fokus Penelitian

Menurut pendapat Moleong (2017:97), fokus penelitian adalah pokok permasalahan yang menjadi titik perhatian utama dalam suatu studi, yang dirumuskan secara spesifik agar penelitian terarah dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sejalan dengan pendapat Moleong tersebut maka peneliti melihat bahwa, yang menjadi fokus penelitian adalah apa yang di uraikan di latar belakang, salah satu permasalahan yang tertulis di identifikasi Masalah. Fokus penelitian ini

"Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Dalam Menanggulangi Kasus Kekerasan Terhadap Anak". Penelitian tertarik melakukan penelitian dikarenakan minimnya untuk melakukan penelitian terkait masalah kekerasan terhadap anak di kabupaten Sanggau dan kekerasan tersebut sangat signifikan dan sudah ada yang menjadi korban di dukung dengan data atau dokumen yang ada oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pernyataan yang menjelaskan fokus permasalahan dalam penelitian, disusun secara jelas dan spesifik untuk memandu arah penelitian serta pencapaian tujuan penelitian (Sugiyono, 2016:60). Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Menanggulangi Kasus Kekerasan Terhadap Anak".

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang ingin dicapai peneliti melalui studi yang dilakukan, baik untuk menjawab pertanyaan penelitian maupun memecahkan masalah yang diteliti (Sugiyono, 2016:65). Tujuan penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau Sanggau Dalam Menanggulangi Kasus Kekerasan Terhadap Anak.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah kontribusi yang diberikan oleh hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, pemecahan masalah praktis, serta memberikan solusi atau informasi yang berguna bagi pihak terkait (Soekidjo, 2010:68). Manfaat penelitian terbagi menjadi 2 yaitu :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi efektivitas kinerja dinas dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang sosial, perlindungan perempuan dan anak, serta keluarga berencana. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi kajian akademis lainnya yang bertujuan untuk mengembangkan strategi peningkatan kinerja di lembaga pemerintahan dalam rangka mendukung kesejahteraan dan keadilan sosial.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Dinsos P3AKB / Pemerintah Kabupaten Sanggau

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dinas dalam mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas serta menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan dan staf untuk meningkatkan kualitas program pemberdayaan sosial, perlindungan hak perempuan dan anak, serta ketahanan keluarga, sekaligus mendukung kebijakan, perencanaan, dan pengambilan keputusan strategis yang lebih efektif di Kabupaten Sanggau.

b. Masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat membantu dinas terkait dalam memperbaiki dan mengoptimalkan program-program yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan peningkatan kinerja dinas, masyarakat Kabupaten Sanggau akan mendapatkan layanan yang lebih cepat, tepat, dan berdampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta memperkuat ketahanan keluarga.

c. Peneliti Lainnya

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi peneliti dalam menganalisis kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak, serta menjadi referensi dalam mengevaluasi kebijakan, efektivitas program, dan strategi peningkatan layanan perlindungan anak di daerah tersebut.